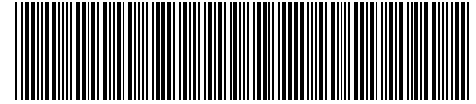




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526737/2026**



DS:6055-7888-7735-0126

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (526737) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
- Sebesar : Rp. 103.416.000 ( SERATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 103.416.000
005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 103.416.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	103.416.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 103.416.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2026  
I A. INFORMASI KINERJA**



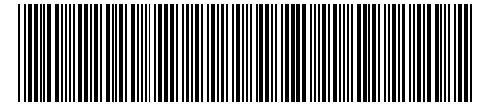
DS:6055-7888-7735-0126

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (526737) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			103.416.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			103.416.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Kegiatan Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		2. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		3. 01	Jumlah Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		4. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		5. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		6. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		8. 02	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		9. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		10. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		11. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		12. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		13. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		14. 08	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	5,00	kegiatan	70.200.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	3,00	kegiatan	43.200.000
		02	AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	2.000.000
		03	AEA.003 Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1,00	kegiatan	25.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2026  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6055-7888-7735-0126

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (526737) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Halaman : I A. 2

---

Klasifikasi Rincian Output	2	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	33.216.000	
Rincian Output		:	01	QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96,00	Orang	33.216.000

---

Jakarta, 01 Desember 2025  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6055-7888-7735-0126

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (526737) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526737	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	-	103.416	-	-	-	103.416		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	103.416	-	-	-	103.416		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	103.416	-	-	-	103.416		
1059.AEA	Koordinasi (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	70.200	-	-	-	70.200	23 . 51	
01	RM	-	70.200	-	-	-	70.200	038	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	33.216	-	-	-	33.216	23 . 51	
01	RM	-	33.216	-	-	-	33.216	038	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>103.416</b>	-	-	-	<b>103.416</b>		

Jakarta, 01 Desember 2025  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2026  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6055-7888-7735-0126

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT  
Kode>Nama Satker : (526737) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526737	<b>Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	3.000	3.000	15.500	39.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.700	3.000	3.000	216	103.416
		<b>BELANJA BARANG</b>	3.000	3.000	15.500	39.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.700	3.000	3.000	216	103.416
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	3.000	3.000	15.500	39.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.700	3.000	3.000	216	103.416
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	3.000	3.000	15.500	39.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.700	3.000	3.000	216	103.416
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1.140
		- PNBP (425232)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
		- PNBP (425233)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		- PNBP (425239)	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	970

Jakarta, 01 Desember 2025  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2026  
IV A. B L O K I R**



DS:6055-7888-7735-0126

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT  
Kode dan Nama Satker : [526737] Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526737/2026  
IV B. C A T A T A N**



DS:6055-7888-7735-0126

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT  
Kode dan Nama Satker : [526737] Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775